



DAFTAR PUSTAKA

- Ary Kurniawan (2016), Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya), <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14051>.
- Cooper, Donald R., Schindler, Pamela S (2006), *Business Research Methods*, Ninth Edition, Amerika Serikat: Mc Graw-Hill.
- Direktorat Jenderal Pajak (2014), Ditjen Pajak Fokus Tangani Pelaku Bisnis Faktur Pajak Fiktif, <http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-fokus-tangani-pelaku-bisnis-faktur-pajak-fiktif>, 1 September.
- Direktorat Jenderal Pajak (2014), Ditjen Pajak Bentuk Satgas Untuk Kejar Pemain Faktur Pajak Fiktif, <http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-bentuk-satgas-untuk-kejar-pemain-faktur-pajak-fiktif>, 1 September.
- Direktorat Jenderal Pajak (2013), E-Nofa, Sistem Baru Ditjen Pajak Cegah Faktur Pajak Fiktif, <http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>, 8 Juli.
- Effendy, Onong Uchjana. (1989). Kamus Komunikasi. Bandung: Informatika
- _____, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*, Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-136 /PJ/2014.
- Mardiasmo (2008), *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- _____, *Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik*, Pengumuman Direktur Jenderal Pajak PENG-3/PJ.02/2014.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013.

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



_____, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-05/PJ/2012.*

1. _____, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 Tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2012.*

_____, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-24/PJ/2012.*

_____, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014.*

_____, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (perubahan kedua PER-24/PJ/2012), Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-17/PJ/2014.*

Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.

Susanto, Astrid S. (1975). *Pendapat Umum*. Bandung: Bina Cipta

_____, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-29/PJ.53/2003.*

_____, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (perubahan SE-29/PJ.53/2003), Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-132/PJ/2010.*

_____, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dan Sertifikat Elektronik, Serta Permintaan, Pengembalian, dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-20/PJ/2014.*

Badan Pusat Statistik, *Tabel Realisasi Penerimaan Negara 2007-2016*, www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286, 24 April.

_____, *Undang Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.*



_____, *Undang-Undang Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

_____, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPN*.

_____, *Arifin, Zainal (2011), Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.